

## Komparasi Regulasi Praktik Dokter Asing dan Dokter Lulusan Luar Negeri (Studi Kasus Vietnam Sebagai Negara Sosialis dan Indonesia Sebagai Negara Pancasila)

Meta Melvina; Eriko Prawestiningtyas; Dina Nihayati; Jonsinar Silalahi; Husni Adam  
Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Soegijapranata Catholic University  
Email: [23c20018@student.unika.ac.id](mailto:23c20018@student.unika.ac.id); [23c20030@student.unika.ac.id](mailto:23c20030@student.unika.ac.id)

### Abstrak

Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan sejarah sebagai negara yang pernah dijajah dan berjuang untuk kemerdekaan, namun keduanya mengambil pendekatan berbeda dalam mengelola sistem kesehatan. Vietnam, sebagai negara sosialis, menerapkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap dokter asing, termasuk dalam hal izin praktik di rumah sakit internasional seperti Vinmec Hospital. Sebaliknya, Indonesia, sebagai negara Pancasila, memiliki regulasi yang lebih ketat, membatasi praktik dokter asing untuk alih teknologi dan program tertentu. Perbedaan ini menjadi latar belakang penelitian untuk memahami bagaimana ideologi dan regulasi memengaruhi sistem kesehatan kedua negara, serta peluang adopsi kebijakan yang relevan bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, mencakup wawancara mendalam dengan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, observasi lapangan, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio dokter di Indonesia (6,23 per 10.000 penduduk) masih lebih rendah dibandingkan Vietnam (8,28 per 10.000 penduduk), dengan distribusi yang tidak merata. Vietnam berhasil memanfaatkan dokter asing untuk meningkatkan layanan kesehatan dan mendukung kolaborasi internasional, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan dan medical tourism. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap dokter asing dengan regulasi ketat, untuk meningkatkan daya saing fasilitas kesehatan lokal, mempercepat transfer teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada layanan kesehatan luar negeri.

Kata Kunci: regulasi kesehatan, dokter asing, Indonesia, Vietnam, hukum kesehatan.

### Abstract

Indonesia and Vietnam share similarities as nations that were once colonized and fought for independence, yet they have taken different approaches in managing their healthcare systems. Vietnam, as a socialist state, implements more open policies for foreign doctors, including granting practice licenses in international hospitals like Vinmec Hospital. Conversely, Indonesia, as a Pancasila-based nation, has stricter regulations, limiting foreign doctors' practices to technology transfer and specific programs. This contrast provides the background for this study to explore how ideology and regulations influence healthcare systems in both countries and identify potential policy adaptations for Indonesia. This research employed a descriptive-exploratory method with a qualitative approach, combining in-depth interviews with the Indonesian Ambassador to Vietnam, field observations, and secondary data analysis. The findings reveal that Indonesia's doctor-to-population ratio (6.23 per 10,000) is lower than Vietnam's (8.28 per 10,000), with significant disparities in distribution. Vietnam has successfully leveraged foreign doctors to enhance healthcare services and support international collaboration, while Indonesia continues to face challenges in equitable distribution of healthcare workers and the growing trend of medical tourism. This study recommends that Indonesia consider adopting

more inclusive policies for foreign doctors under strict regulations to enhance the competitiveness of local healthcare facilities, accelerate technology transfer, and reduce reliance on overseas medical services.

Keywords: healthcare regulation, foreign doctors, Indonesia, Vietnam, health law.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan sejarah sebagai negara yang pernah dijajah dan berjuang untuk kemerdekaan. Kedua negara mengalami fase transisi dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengembangan sistem kesehatan. Pengalaman ini menciptakan latar belakang unik yang relevan untuk memahami bagaimana konteks sejarah memengaruhi perkembangan regulasi hukum kesehatan. Baik Indonesia maupun Vietnam memiliki latar belakang sejarah yang sama dalam hal kolonialisme. Keduanya mengalami penjajahan oleh kekuatan asing Indonesia oleh Belanda dan Vietnam oleh Perancis. Pengalaman ini membentuk kesadaran nasionalisme yang kuat di kedua negara. Meskipun berbeda dalam ideologi, kedua negara menekankan pentingnya kolektivitas dalam pembangunan. Sehingga meskipun memiliki perbedaan ideologi namun Indonesia dan Vietnam yang juga sebagai sesama anggota ASEAN, berkomitmen untuk menciptakan kerjasama regional, terutama untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama dalam kerangka komunitas internasional khususnya ASEAN<sup>1</sup>.

Meskipun berbeda dalam ideologi, kedua negara menekankan pentingnya kolektivitas dalam pembangunan ekonomi dan kesehatan. Indonesia dengan Pancasila dan Vietnam dengan sistem sosialisme keduanya mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif eksploratif. Data didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber Bapak Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, mengajukan pertanyaan terbuka dan mendengarkan dengan aktif, juga dengan mencari dari internet, jurnal untuk data yang belum didapatkan dari wawancara.

Format wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan sebelum visitasi studi banding, namun fleksibel untuk improvisasi. Alat yang digunakan adalah perekam suara dan notulensi lapangan.

Validitas dan reabilitas dalam penelitian ini dijaga dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber data lain dari internet, observasi lapangan, wawancara tambahan dan melakukan konsultasi dengan pembimbing yang juga ikut dalam studi banding.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Vietnam dan Indonesia**

Indonesia dan Vietnam memiliki sejarah perjuangan yang serupa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, meskipun perkembangan kedaulatan dan situasi geopolitik masing-masing negara berbeda secara signifikan. Indonesia dan Vietnam sama-sama memproklamasikan

---

<sup>1</sup> Diana Septaviana, Ardhana Chrsitian Noventri. (2023). *Perbandingan Sistem Ekonomi di Inonesia dan Vietnam berdasarkan konstitusi dalam menjawab permasalahan Kemiskinan Struktural*. Jurnal Kawruh Aviyasa. Vol 2 No 2. 188-190

kemerdekaan mereka pada tahun 1945, dengan Indonesia pada 17 Agustus dan Vietnam pada 2 September. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, wilayah yang dikuasai Jepang, termasuk Indonesia dan Vietnam, harus dikembalikan ke penguasa kolonial sebelumnya berdasarkan perjanjian internasional, sehingga Indonesia dikembalikan kepada Belanda, sementara Vietnam dan Indochina dikembalikan kepada Perancis.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Soekarno, menggunakan strategi diplomasi ke negara-negara sahabat untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan. Namun, perjuangan melawan kolonialisme Belanda tetap berlanjut hingga tercapainya pengakuan kedaulatan penuh pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar<sup>2</sup>.

Sementara itu, Vietnam mengalami perang berkepanjangan. Perancis menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Vietnam dan akhirnya terdesak setelah kekalahan besar di Dien Bien Phu pada tahun 1954. Setelah itu, Vietnam terpecah menjadi dua bagian yaitu Vietnam Utara yang dipimpin oleh rezim komunis, dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Perancis dan kemudian Amerika Serikat<sup>3</sup>.

Vietnam mengalami perang yang sangat menghancurkan pada masa Perang Vietnam, terutama setelah keterlibatan Amerika Serikat. Perang ini berlangsung hingga 1975, dengan berakhirnya konflik melalui reunifikasi di bawah kepemimpinan komunis Vietnam Utara.

Vietnam baru mulai membangun kembali ekonominya pada tahun 1975-an, mulai pesat sejak 1990 saat pemerintah memperkenalkan reformasi *Đổi Mới* yang berorientasi pada pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesehatan beriringan dengan pembangunan ekonomi.

## 2. Kebijakan Kesehatan di Vietnam dan di Indonesia

Antara Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila dan Vietnam sebagai negara sosialis, terdapat beberapa hal berbeda yang dapat diadopsi Indonesia untuk memperbaiki sistem kesehatannya. Dalam sistem sosialis, kemajuan ekonomi didistribusikan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk pemilik modal atau kapitalis. Sebaliknya, dalam sistem kapitalis, inovasi seringkali lebih berfokus dan berpihak pada keuntungan pemodal besar. Indonesia, sebagai negara Pancasila, berada di tengah-tengah kedua sistem tersebut. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia lebih terbuka dibandingkan Vietnam yang merupakan negara sosialis-komunis? Menariknya, Vietnam justru terlihat lebih terbuka dalam beberapa hal. Sebagai contoh, Vietnam mengizinkan banyak dokter asing untuk berpraktik di negara tersebut, bahkan terdapat rumah sakit yang dikelola oleh pihak Perancis dan Rusia.

Dokter asing yang ingin bekerja di Vietnam harus mematuhi persyaratan dan peraturan hukum, yaitu<sup>4</sup>:

<sup>2</sup> Wiharyanto, A. Kardiyat. (2022). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Sanata Dharma University Press

<sup>3</sup> Farlian Oktora Pramudia, Risma Margaretha Sinaga dan Henry, Susanto. (2019). *Dampak Perang Vietnam Terhadap Perkembangan Komunisme di Indonesia 1957-1966*. Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 1-15

<sup>4</sup> Medical license in Vietnam for foreigners and overseas Vietnamese. <http://www.lawyervn.net/en/procedures/enterprises/license/medical-license-in-vietnam-for-foreigners-and-overseas-vietnamese.html>. 2023, diakses 22 November 2024, lihat juga Vietnam Immigration News. Some main contents of the Law on amendments to a number of articles of the Law on Foreigners' Entry into, Exit from, Transit through, and Residence in Vietnam. <https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/tin-tuc/some-main-contents-law-amendments-number-articles-law-foreigners%E2%80%99-entry-exit-transit-through>. 2024. Diakses 23 November 2024

1. Sertifikasi dan pengakuan profesi

Dokter asing harus memiliki kualifikasi medis yang diakui di Vietnam, hal ini harus dibuktikan dengan pemberian kualifikasi, gelar, dan lisensi profesional dari negara asal mereka. Dokumen ini perlu diresmikan dengan pembuatan akta berbahasa Vietnam.

2. Perizinan oleh Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan di Vietnam mengeluarkan izin praktik medis kepada dokter asing. Pelamar harus memenuhi persyaratan khusus seperti bukti keterampilan profesional, pengalaman, dan kepatuhan terhadap standar layanan kesehatan Vietnam. Kemahiran bahasa Vietnam mungkin diperlukan, atau penerjemah harus diatur selama latihan.

3. Permohonan Izin Kerja

Izin kerja diperlukan, diperoleh melalui Departemen Tenaga Kerja, Penyandang Cacat, dan Sosial Vietnam (DOLISA). Hal ini mencakup penyerahan formulir permohonan, sertifikat pemeriksaan kesehatan, bukti kualifikasi, dan kontrak dengan pemberi kerja atau sponsor di Vietnam.

4. Persyaratan Visa dan Tempat Tinggal

Dokter asing perlu mendapatkan visa yang sesuai, seperti visa kerja, dan dapat mengajukan permohonan kartu tinggal sementara. Visa biasanya disponsori oleh lembaga perekrutan.

5. Pekerjaan di Institusi Terdaftar

Dokter asing harus bekerja dengan fasilitas kesehatan berlisensi dan terdaftar di Vietnam. Pengusaha biasanya membantu penanganan proses administrasi, termasuk pengajuan izin dan lisensi atas nama dokter.

6. Pembaruan dan Kepatuhan

Izin kerja dan izin praktik memiliki masa berlaku, biasanya satu hingga dua tahun, dan memerlukan perpanjangan tepat waktu. Kepatuhan terhadap undang-undang setempat, termasuk kewajiban perpajakan dan peraturan ketenagakerjaan, adalah suatu keharusan.

Untuk panduan lebih rinci, konsultasikan dengan Kementerian Kesehatan Vietnam, Departemen Tenaga Kerja, atau otoritas imigrasi Vietnam. Selalu pastikan dokumentasi sejalan dengan peraturan Vietnam, yang diperbarui secara berkala.

Prosedur penerbitan izin medis di Vietnam bagi orang asing dan orang Vietnam luar negeri:

1) Ketentuan penerbitan izin medis di Vietnam untuk orang asing dan orang Vietnam luar negeri

- a) Memiliki salah satu gelar atau sertifikat berikut sesuai dengan bentuk praktik kedokteran:
  - i. Gelar profesi kedokteran yang diberikan atau diakui di Vietnam;
  - ii. Surat keterangan menjadi dokter;
  - iii. Surat keterangan sebagai orang yang mempunyai pengobatan tradisional atau cara mengobati suatu penyakit.
- b) Memiliki surat keterangan tertulis tentang proses prakteknya, kecuali bagi dokter, orang yang mempunyai pengobatan tradisional, atau mempunyai cara pengobatan tradisional.
- c) Memiliki surat keterangan sehat untuk praktik kedokteran.

- d) Tidak sedang dalam hal dilarang melakukan praktek kedokteran atau melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian kedokteran atau kefarmasian menurut putusan atau keputusan pengadilan; dituntut karena tanggung jawab pidana; sedang menjalani pidana, putusan pidana pengadilan, atau putusan penerapan tindakan penanganan administratif, dan diserahkan kepada lembaga pendidikan atau tempat pengobatan; sedang dalam masa pendisiplinan berupa teguran atau yang lebih berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan profesi; kehilangan atau pembatasan kapasitas bertindak perdata.
  - e) Memenuhi persyaratan penggunaan bahasa dalam pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Perawatan Kesehatan
  - f) Memiliki catatan kriminal yang disahkan oleh otoritas yang berwenang di negara tuan rumah (berlaku untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan izin kerja).
  - g) Memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang kompeten di Vietnam sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
- 2) Persyaratan penggunaan bahasa dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di Vietnam bagi orang asing dan orang Vietnam di luar negeri
- a) Sertifikat kemahiran berbahasa Vietnam bagi orang asing yang mendaftar untuk menggunakan bahasa Vietnam untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
  - b) Jika pemohon izin medis tidak memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Vietnam, seorang juru bahasa harus tersedia untuk menerjemahkan dari bahasa terdaftarnya ke dalam bahasa Vietnam.
  - c) Dalam hal pemohon izin kesehatan mendaftar untuk menggunakan bahasa selain bahasa aslinya untuk pemeriksaan dan pengobatan kesehatan, ia harus memiliki sertifikat kemahiran dalam bahasa tersebut dan harus didampingi oleh seorang penerjemah untuk menerjemahkan dari bahasa tersebut ke dalam bahasa vietnam.
  - d) Bagi orang asing yang mendaftar untuk menggunakan bahasa selain bahasa ibu untuk pemeriksaan dan pengobatan kesehatan:
    - i. Sertifikat kemahiran dalam bahasa yang didaftarkan oleh praktisi untuk digunakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Keputusan 109/2016/ND-CP untuk pemeriksaan kesehatan;
    - ii. Sertifikat kualifikasi penerjemahan dari penerjemah yang didaftarkan oleh praktisi untuk digunakan dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Surat Keputusan 109/2016/ND-CP dan kontrak kerja juru bahasa dengan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan tempat praktisi bekerja;
- 3) Persyaratan sertifikasi masa praktik
- Sebelum diberikan izin medis, seseorang dengan gelar kedokteran yang diberikan atau diakui di Vietnam harus pernah berpraktik di tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan berikut:
- a) 18 bulan praktek di rumah sakit, atau penelitian dirumah sakit untuk dokter;
  - b) 12 bulan praktek rumah sakit untuk dokter;

- c) 09 bulan praktek di rumah sakit yang memiliki bagian kebidanan atau di rumah bersalin untuk mahasiswa.
  - d) bulan praktek di tempat pemeriksaan kesehatan dan perawatan untuk perawat dan teknisi.
- 4) File permohonan penerbitan izin medis di Vietnam untuk orang asing dan orang Vietnam luar negeri
- a) Formulir permohonan izin kesehatan, dibuat sesuai Formulir 04, Lampiran I yang diterbitkan bersama dengan Keputusan 109/2016/ND-CP
  - b) Salinan ijazah profesi kedokteran yang sah dan sesuai dengan mata pelajaran praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan.
  - c) Surat Izin Praktik
  - d) Dalam hal praktik di Vietnam, lengkapi Formulir 02, Lampiran I yang diterbitkan bersama dengan Keputusan 109/2016/ND-CP; b) Dalam hal praktik di tempat pemeriksaan dan pengobatan kesehatan di luar negeri, sertifikasi tertulis tentang proses praktik dari orang yang berkompeten di tempat tersebut harus memuat hal-hal berikut: Nama lengkap praktisi; tanggal lahir; alamat tempat tinggal; nomor paspor (tanggal penerbitan, tempat penerbitan); gelar profesional; Tahun lulus; tempat latihan; waktu latihan; sertifikat kompetensi profesional dan etika profesi praktisi tersebut.
  - e) Salinan izin kerja yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga negara Vietnam yang berwenang yang membidangi ketenagakerjaan.
  - f) Salinan dokumen :
    - i. Sertifikat kemahiran berbahasa Vietnam, bagi orang asing yang mendaftar untuk menggunakan bahasa Vietnam untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;
    - ii. Sertifikat kualifikasi penerjemahan juru bahasa sesuai dengan bahasa yang didaftarkan oleh praktisi untuk digunakan dalam pemeriksaan dan pengobatan kesehatan serta kontrak kerja juru bahasa dengan tempat pemeriksaan dan pengobatan kesehatan tempat praktisi bekerja;
    - iii. Bagi orang asing yang mendaftar untuk menggunakan bahasa selain bahasa asli mereka untuk pemeriksaan dan pengobatan kesehatan:
      - 1. Sertifikat kemahiran dalam bahasa yang telah didaftarkan oleh praktisi untuk digunakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Keputusan No. Keputusan 109/2016/ND-CP untuk pemeriksaan dan pengobatan kesehatan;
      - 2. Sertifikat kemahiran penerjemah bahasa yang didaftarkan oleh praktisi untuk digunakan dalam pemeriksaan dan perawatan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Keputusan 109/2016/ND-CP dan kontrak kerja pelamar. penerjemah dengan tempat pemeriksaan dan pengobatan medis di mana praktisi tersebut bekerja.
  - g) Surat keterangan sehat untuk pemeriksaan dan pengobatan kesehatan, yang diterbitkan oleh lembaga pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, atau surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh lembaga pemeriksaan dan pengobatan kesehatan luar negeri, waktu penerbitan surat

- keterangan kesehatan paling lama 12 bulan sejak tanggal pengajuan permohonan izin kesehatan.
- h) Criminal record (berlaku untuk kasus yang tidak tunduk pada penerbitan izin kerja).
  - i) Dua buah foto berwarna ukuran 04 cm x 06 cm diambil dengan latar belakang putih dalam jangka waktu tidak lebih dari 06 bulan, sampai dengan tanggal lamaran.
  - j) (Salinan resmi gelar profesional; Sertifikat praktik; Salinan resmi sertifikat kemahiran dalam bahasa Vietnam yang dikeluarkan oleh organisasi asing harus dilegalisir konsuler dan diterjemahkan ke dalam bahasa Vietnam, terjemahannya harus disertifikasi sesuai dengan ketentuan hukum Vietnam).
- 5) Prosedur penerbitan izin medis di Vietnam untuk orang asing dan orang Vietnam di luar negeri
- a) Pemohon izin medis harus mengirimkan berkas permohonan ke Kementerian Kesehatan Vietnam;
  - b) Kementerian Kesehatan Vietnam akan menerima dan mengirimkan tanda terima permohonan kepada pemohon.
  - c) Dalam waktu 20 hari sejak tanggal permohonan diterima, Kementerian Kesehatan Vietnam akan mempertimbangkan dan menilai permohonan tersebut dan menerbitkan berita acara penilaian terperinci:
    - i. Jika permohonan sah, dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal catatan penilaian, lembaga penerima permohonan akan menerbitkan izin kesehatan kepada pemohon.
    - ii. Dalam hal permohonan tidak sah, dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal catatan penilaian, lembaga penerima permohonan harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. pemohon izin kesehatan untuk melengkapi berkas. Pemberitahuan tertulis harus menyebutkan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi dan isi yang perlu diubah.
    - iii. Jika tidak memenuhi syarat untuk menerbitkan sertifikat praktik, Kementerian Kesehatan Vietnam akan membalas secara tertulis dan menyebutkan alasannya.

Indonesia hingga saat ini belum membuka diri untuk menyerap tenaga medis dan tenaga kesehatan asing. Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat berpraktek di Indonesia setelah melewati masa tahap adaptasi dan memenuhi persyaratan yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang baru No. 17 tahun 2023 menyatakan Indonesia sudah mulai membuka diri terhadap tenaga asing namun pada implemetasinya hingga saat ini belum jelas petunjuk teknis pelaksanaannya di lapangan.

### 3. Perbedaan Ideologi Vietnam dan Indonesia

Indonesia dengan ideologi Pancasila, menekankan pada pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Vietnam yang mengadopsi ideologi Marxisme-Leninisme, berfokus pada kepemilikan kolektif dan penghapusan kelas sosial. Meskipun Vietnam telah mengimplementasikan reformasi ekonomi melalui kebijakan Doi Moi, negara ini tetap

mempertahankan kontrol negara yang kuat dalam berbagai aspek, termasuk layanan kesehatan<sup>5</sup>. Perbedaan ideologi mempengaruhi cara masing-masing negara mengelola layanan kesehatan. Indonesia berupaya untuk menciptakan sistem yang inklusif dengan penekanan pada keadilan sosial, sementara Vietnam mempertahankan kontrol negara yang kuat dalam penyediaan layanan kesehatan. Meskipun kedua negara memiliki tujuan untuk menyediakan akses kesehatan bagi warganya, tantangan dalam implementasi tetap ada di kedua belah pihak. Dalam hal pemenuhan layanan kesehatan maka sangat diperlukan pemenuhan SDM kesehatan terutama dokter yang berkualitas baik dari sisi jumlah dan kompetensi.

Berdasarkan konstitusi, Konstitusi, didalam Pasal 28 H UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan<sup>6</sup>. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Dengan memberlakukan Sistem Kesehatan Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh penduduk. Meskipun demikian, implementasi JKN masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, salah satunya pemerataan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis.

Pasal 38 Konstitusi Vietnam menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menyediakan layanan kesehatan yang merata. Sistem kesehatan diatur oleh undang-undang yang menekankan pada akses universal. Vietnam menerapkan sistem asuransi kesehatan sosial yang mencakup hampir seluruh populasi. Namun, meskipun ada upaya untuk pemerataan, masih terdapat ketidakmerataan dalam akses dan kualitas layanan, terutama antara kota besar dan daerah pedesaan

#### **4. Rasio Dokter dan Penduduk di Vietnam dan di Indonesia**

Berdasarkan data dari WHO tahun 2023, rasio dokter di Vietnam adalah 8,28 per 10.000 penduduk. Pemerintah Vietnam memfasilitasi pelatihan tenaga kesehatan dengan integrasi teknologi dan kolaborasi internasional. Sementara data WHO tahun 2023, rasio dokter Indonesia adalah 6,23 per 10.000 penduduk. WHO merekomendasikan 1 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Di Indonesia yang adalah negara kepulauan, tantangan distribusi dokter di daerah terpencil dan kurangnya insentif bagi tenaga kesehatan untuk bekerja di wilayah terpencil<sup>7</sup>.

Vietnam lebih unggul dalam distribusi tenaga medis dengan dukungan kebijakan yang jelas, sementara Indonesia masih perlu memperkuat regulasi insentif untuk tenaga medis di daerah terpencil.

#### **5. Pengaruh Dunia terhadap Indonesia dan Vietnam**

Kedua negara ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi pasar, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan tantangan seperti perubahan iklim. Krisis keuangan global tahun 2008, misalnya, mendorong Indonesia dan Vietnam untuk memperkuat

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Lihat Pasal 28 Undang – undang Dasar Negara RI tahun 1945

<sup>7</sup> Shilvina Widi. Rasio Dokter Indonesia Terendah Ketiga di Asia Tenggara. <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/rasio-dokter-indonesia-terendah-ketiga-di-asia-tenggara>. 2022. Doakses 23 November 2024

kebijakan ekonomi domestik dan diversifikasi pasar ekspor. Vietnam melakukan banyak ekspor produk yang telah dihilirisasi ke luar negeri. Jika dunia mengalami krisis, sangat mempengaruhi Vietnam. Karena stabilitas Vietnam bergantung pada keadaan global negara lain, maka Vietnam membuka diri terhadap kerja sama dengan pihak asing.

Selain itu, integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas dan partisipasi dalam organisasi regional seperti ASEAN telah membuka peluang sekaligus tantangan bagi kedua negara dalam menghadapi persaingan global. Secara keseluruhan, Indonesia dan Vietnam terus beradaptasi dengan perubahan global, berupaya meningkatkan peran mereka dalam ekonomi dunia, dan berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi regional dan global.

## 6. Kebijakan Penyerapan Dokter Asing dan Dokter Lulusan Luar Negeri di Vietnam

Berdasarkan Vietnam Health Law No. 15/2023, Vietnam telah mengintegrasikan dokter asing ke dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan medis.

Vietnam lebih adaptif terhadap globalisasi layanan kesehatan, sementara Indonesia dapat mempertimbangkan revisi kebijakan untuk mendatangkan dokter asing demi peningkatan kualitas layanan medis. Berdasarkan Vietnam Health Law No. 15/2023, Artikel 19 dinyatakan bahwa: Warga Negara Asing (WNA) dapat mengajukan izin praktik kesehatan di Vietnam dengan memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

- Surat izin tersebut diakui berdasarkan perjanjian yang melibatkan Vietnam atau berdasarkan perjanjian internasional yang melibatkan Vietnam;
- Diberikan oleh Kementerian Kesehatan pasca melewati masa evaluasi;
- Kualifikasi profesional yang relevan dan pengalaman praktik;
- Sertifikat kemampuan Bahasa dari Lembaga pendidikan berlisensi;
- Tidak memiliki catatan kriminal yang dibuktikan dari dokumen yang diterbitkan oleh negara asal;
- Memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh otoritas ketenagakerjaan yang berwenang (Article 19).

Mulai tahun 1990 Vietnam mengadopsi sistem market ekonomi, mengikuti apa yang terjadi di China. Vietnam membangun industri berdasarkan daya saing, jadi mulai berpikir bagaimana caranya membangun Rumah Sakit yang sangat bagus untuk warga Vietnam. Usaha tersebut dikerjakan dengan serius hingga Vietnam menyediakan penerjemah untuk mendampingi pasien internasionalnya yang diobati oleh dokter lokal dan pasien lokal yang diperiksa oleh dokter internasionalnya sesuai dengan bahasa, sehingga diupayakan agar bahasa tidak menjadi kendala. Contoh sarana pelayanan kesehatan yang bersifat internasional adalah Rumah Sakit Vinmec (melayani separuh warga vietnam, separuhnya warga luar negeri), French hospital (tenaga medis full asing), Rusia Hospital (tenaga medis full asing).

## 7. Kebijakan Penyerapan Dokter Asing dan Dokter Lulusan Luar Negeri di Indonesia

Indonesia memiliki regulasi lebih ketat terhadap dokter asing berdasarkan UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, yang hanya mengizinkan dokter asing bekerja dalam rangka transfer teknologi. Saat ini ada Undang-Undang Kesehatan baru no 17 Tahun 2023 yang mereformasi sistem Indonesia menjadi lebih terbuka. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan

No.17 memberi sedikit kelonggaran untuk masuknya tenaga medis dan tenaga kesehatan asing ke Indonesia. Di dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa tenaga Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri dan lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi<sup>8</sup>. Dasar hukum mengenai praktik dokter asing atau dokter lulusan luar negeri di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan dasar hukum tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

UU ini mengatur dasar legalitas praktik kedokteran di Indonesia, termasuk bagi dokter asing atau lulusan luar negeri. Beberapa poin penting:

- Pasal 27 ayat (1): Setiap dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
- Pasal 28 ayat (1): STR dapat diperoleh setelah dokter lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
- Pasal 36: Dokter asing yang berpraktik di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di lokasi tertentu.

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

KKI adalah lembaga yang mengatur registrasi dan kompetensi dokter, termasuk dokter asing atau lulusan luar negeri. Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi:

- Dokter lulusan luar negeri wajib menyetarakan ijazahnya melalui Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan.
- Wajib menjalani program adaptasi untuk memastikan kompetensinya sesuai dengan standar Indonesia.
- Wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU ini menyebutkan bahwa tenaga kesehatan asing hanya dapat bekerja di Indonesia sesuai peraturan dan kebutuhan nasional:

- Pasal 7 dan Pasal 44: Pemerintah mengatur izin praktik dokter asing untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasien.
- Dokter asing wajib bekerja dalam rangka alih teknologi atau program tertentu yang disetujui pemerintah.

4. Peraturan Menteri Kesehatan

Beberapa peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) memberikan panduan teknis:

- A. Permenkes Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing:

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- Dokter asing hanya dapat bekerja dalam program pemerintah atau swasta yang berorientasi pada alih teknologi atau kerja sama pendidikan.
  - Harus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Asing (SIKTA) dari Kementerian Tenaga Kerja
- B. Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran : Dokter asing harus memenuhi syarat administratif (STR, SIP, visa kerja) dan teknis (sertifikasi kompetensi).
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengakuan Ijazah Luar Negeri:
- Dokter lulusan luar negeri harus melalui proses penyetaraan ijazah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
  - Penyetaraan ini penting untuk memastikan ijazah memenuhi standar pendidikan nasional.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
UU ini mengatur aspek ketenagakerjaan bagi tenaga asing, termasuk dokter:
- Pasal 42: Dokter asing wajib memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
  - Pasal 48: Pemberi kerja harus memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan lokal sebagai bagian dari alih teknologi.
7. Undang- Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan  
Paragraf 7 tentang Pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri.  
Dalam pasal 248 sampai pasal 257 mengatur secara ketat proses penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia. Tahapan dan persyaratan tersebut antara lain:
- 1) Hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.
  - 2) Evaluasi Kompetensi dilakukan oleh menteri dengan melibatkan Konsil dan Kolegium
  - 3) Evaluasi kompetensi meliputi kelengkapan administrasi dan kemampuan praktek dengan penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi.
  - 4) Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu lulusan luar negeri harus mengikuti proses adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 17 tahun 2023, paragraf 11 tentang Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Dalam pasal 658 sampai 668 menetapkan beberapa hal dalam pengaturan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan warga asing atau lulusan luar negeri antara lain:
- 1) Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing terdiri atas: a. lulusan dalam negeri; atau b. lulusan luar negeri.

- 2) Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing harus mempertimbangkan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara nasional dan mengutamakan penggunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia.
- 3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri hanya dapat melakukan praktik atas permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna dengan batasan waktu tertentu.
- 4) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu.
- 5) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri dilarang menyelenggarakan praktik secara mandiri dan wajib mematuhi ketentuan tentang praktik keprofesian yang berlaku di Indonesia.
- 6) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri yang akan melaksanakan praktik di Indonesia wajib memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang Kesehatan.
- 7) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri harus memiliki pengalaman praktik keprofesian paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya.
- 8) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri dapat melakukan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia dengan ketentuan: a. terdapat permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna Tenaga Medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan; b. untuk alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan c. untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- 9) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang Kesehatan serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri yang didayagunakan.
- 11) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri harus mengikuti evaluasi kompetensi.
- 12) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menilai kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri yang akan berpraktik di Indonesia.
- 13) Penyelenggaraan evaluasi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesehatan, dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Konsil, dan Kolegium.

## PENUTUP

Kita bisa belajar dari Vietnam akan perencanaan dan implementasi. Di Vietnam, apa yang sudah direncanakan, dipastikan program tersebut berhasil dan diawasi. Ini lebih mudah karena sistem negara sosialis dengan sistem leadership yang top down.

Di Indonesia dalam hal pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melewati tahapan yang sangat panjang dan cukup sulit dibandingkan dengan di negara Vietnam. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi negara kita dimana negara kita masih sangat kekurangan dokter baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Banyaknya aturan dan regulasi akan mempersulit Tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk masuk ke Indonesia yang akan memberi hambatan juga dalam perkembangan dunia kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik masyarakat Indonesia .

Orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat karena merasa dokter dan Rumah Sakit di luar negeri lebih hebat dan canggih daripada dalam negeri. Jika Indonesia tetap tertutup, tidak mau memasukkan dokter asing ke dalam Indonesia, warga Indonesia akan tetap mencari pengobatan yang menurut mereka canggih dan justru ketertutupan ini akan memberikan kemunduran pada sistem kesehatan di Indonesia.

Dokter Indonesia harus update terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga tidak tertinggal. Salah satu cara adalah transfer teknologi tersebut ke dalam negeri seperti yang dilakukan oleh Vietnam, mendatangkan ahli dari Perancis untuk berpraktek di Vietnam. Menutup diri habis-habisan tidak pernah akan baik untuk Indonesia.

Dengan alasan memenuhi rasio dokter dengan jumlah penduduk, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, keterbatasan spesialisasi dan subspecialisasi, meningkatkan daya saing dan mengurangi medical tourism, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan lokal dengan transfer teknologi dan keahlian, membuka diri untuk kompetisi yang sehat, maka Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menyerap dokter asing dengan regulasi yang ketat. Dengan mempelajari pengalaman negara Vietnam, di mana perencanaan dan implementasi dipastikan sejalan, dan dengan regulasi serta pengawasan yang baik dapat memastikan kehadiran dokter asing mendukung sistem kesehatan Indonesia tanpa mengurangi kesempatan bagi tenaga medis lokal. Baik Vietnam maupun Indonesia memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warganya. Persamaan terletak pada fokus keduanya terhadap layanan kesehatan primer dan cakupan kesehatan universal. Namun, perbedaan mencolok terletak pada sistem pemerintahan (terpusat versus desentralisasi) dan efisiensi implementasi kebijakan. Meski memiliki konteks budaya dan politik yang berbeda, kedua negara menunjukkan bahwa reformasi kesehatan membutuhkan pendekatan yang inklusif dan inovatif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana Septaviana, Ardhana Chrsitian Noventri. Perbandingan Sistem Ekonomi di Indonesia dan Vietnam berdasarkan konstitusi dalam menjawab permasalahan Kemiskinan Struktural. Jurnal Kawruh Aiyasa. Vol 2 No 2. 2023. Halaman 188-190
- Farlian Oktora Pramudia; Risma Margaretha Sinaga; Henry, Susanto. Dampak Perang Vietnam Terhadap Perkembangan Komunisme di Indonesia 1957-1966. Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 2019, 1-15.

**Meta Melvina; Eriko Prawestiningtyas; Dina Nihayati; Jonsinar Silalahi; Husni Adam**

*Komparasi Regulasi Praktik Dokter Asing dan Dokter Lulusan Luar Negeri (Studi Kasus Vietnam Sebagai Negara Sosialis dan Indonesia Sebagai Negara Pancasila)*

Medical license in Vietnam for foreigners and overseas Vietnamese. <http://www.lawyervn.net/en/procedures/enterprises/license/medical-license-in-vietnam-for-foreigners-and-overseas-vietnamese.html>. 2023, diakses 22 November 2024

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang tata cara registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Shilvina Widi. Rasio Dokter Indonesia Terendah Ketiga di Asia Tenggara. <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/rasio-dokter-indonesia-terendah-ketiga-di-asia-tenggara>. 2022. Diakses 23 November 2024

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Vietnam Immigration News. Some main contents of the Law on amendments to a number of articles of the Law on Foreigners' Entry into, Exit from, Transit through, and Residence in Vietnam. <https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/tin-tuc/some-main-contents-law-amendments-number-articles-law-foreigners%E2%80%99-entry-exit-transit-through>. 2024. Diakses 23 November 2024

Wiharyanto, A. Kardiyat. Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009. Sanata Dharma University Press, 2022.